

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Organisasi merupakan sekumpulan orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Menghadapi era globalisasi yang penuh dengan tantangan dan peluang ini, para pimpinan organisasi dituntut untuk mengembangkan kebijakan dalam mewujudkan profil organisasi yang baik. Seperti halnya dalam penerapan Pengarusutamaan Gender atau biasa disebut dengan PUG. Presiden Republik Indonesia menginstruksikan kepada semua institusi pemerintah, untuk menerapkan Pengarusutamaan Gender (PUG), guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender, berdasarkan bidang tugas dan fungsi serta kewenangannya masing-masing. Kementerian Keuangan sangat berkomitmen atas implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG). Salah satu Instansi yang merespon Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo, dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor SE-116/PB/2017 tentang Implementasi Pengarusutamaan Gender yang disertai dengan buku panduannya. Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo mulai mengimplementasikan Pengarusutamaan Gender sejak tahun 2014 dan semakin fokus sejak tahun 2017. (Susilo et al., 2019)

Pengarusutamaan Gender atau PUG ini dilakukan dengan mengintegrasikan prespektif gender ke dalam proses pembangunan pada setiap bidang. Berbagai

upaya telah dilakukan oleh Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo dalam mengimplementasikan Pengarusutamaan Gender yaitu internalisasi dan eksternalisasi Pengarusutamaan Gender. Melalui internalisasi Pengarusutamaan Gender, Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo berusaha mewujudkan layanan responsif gender dan berkeadilan, dan menyediakan sarana prasarana yang responsif gender serta upaya-upaya menghadirkan SDM (Sumber Daya Manusia) yang memiliki pemahaman tentang Pengarusutamaan Gender. Berangkat dari pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai pengawal APBN di daerah, Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo memperluas implementasi Pengarusutamaan Gender melalui eksternalisasi Pengarusutamaan Gender. Upaya eksternalisasi Pengarusutamaan Gender tersebut dilakukan dengan mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender ke dalam setiap kegiatan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo selaku pembina keuangan Kementerian/Lembaga dan juga selaku mitra pengelola keuangan Pemerintah Daerah. (Susilo et al., 2019)

Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo ini telah meraih posisi kedua dalam lomba penerapan Pengarusutamaan Gender di lingkungan Kementerian Keuangan mewakili Gorontalo pada tahun 2019. Salah satu upaya dalam mengimplementasi Pengarusutamaan Gender tersebut, tentunya membutuhkan kerjasama yang baik di antara sumber daya yang terdapat dalam Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo, serta perlu merancang dan melaksanakan tata kelola komunikasi yang baik.

Suranto Aw (2018: 32) telah menjelaskan bahwa tata kelola komunikasi merupakan sistem pengaturan atau pengelolaan komunikasi yang terjadi dalam suatu organisasi dan bertujuan untuk meningkatkan kinerja dari organisasi tersebut. Sistem pengaturan tersebut dimaksud agar proses komunikasi organisasi berada dalam koridor aturan dan kesepakatan yang berlaku dalam organisasi dan berfungsi sesuai dengan harapan, juga sebagai acuan dalam pengelolaan komunikasi organisasi dan dalam pembuatan petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis komunikasi organisasi, serta mampu menciptakan pengelolaan komunikasi organisasi yang efektif dan efisien berdasarkan prinsip-prinsip tata komunikasi yang baik.

Sama halnya yang dikemukakan oleh Utomo dan Mariana (dalam Aw, 2018:32) bahwa tata kelola komunikasi organisasi merupakan struktur hubungan dan proses yang memandu, mengendalikan, dan mengarahkan suatu organisasi untuk mencapai tujuannya dan mengutamakan fungsi komunikasi dan koordinasi untuk keharmonisan kerja. Tata kelola komunikasi organisasi sangat penting untuk dipahami dan dipelajari. Dengan pengelolaan komunikasi yang baik, semua elemen yang ada dalam suatu organisasi tersebut dapat disatukan dan diintegrasikan untuk mencapai tujuannya. Berbagai hasil kajian telah menunjukkan bahwa kerja sama yang baik antara pimpinan dan anggota organisasi menjadi kunci kualitas dari tata kelola komunikasi.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menelusuri tentang Tata Kelola Komunikasi Organisasi dalam Implementasi Pengarusutamaan Gender di Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo.

1.2 Fokus penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini berfokus pada proses Tata Kelola Komunikasi Organisasi dalam Implementasi Pengarusutamaan Gender di Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo.

1.3 Rumusan masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana Tata Kelola Komunikasi Organisasi dalam Implementasi Pengarusutamaan Gender di Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo?”

1.4 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Tata Kelola Komunikasi Organisasi dalam Implementasi Pengarusutamaan Gender di Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo.

1.5 Manfaat penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dan memperkaya kajian tata kelola komunikasi khususnya dalam komunikasi organisasi, juga sebagai bahan acuan dan informasi tambahan bagi peneliti-peneliti lain.

b. Manfaat Praktis

Sebagai sarana dalam mewujudkan pengelolaan komunikasi yang baik dalam suatu organisasi.